

## TAJUK RENCANA

### PPKM Diperpanjang

**KASUS** warga positif Covid-19 sejak diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), 11 Januari lalu, terus bertambah. Bahkan kasus-kasus Covid-19 di berbagai daerah terkesan tidak terkendali. Salah satu faktornya, masih ada warga yang tidak sepenuhnya melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus korona.

Kondisi itulah yang mendorong pemerintah memperpanjang PPKM di Jawa-Bali yang semula dijadwalkan berlangsung hingga 25 Januari 2021, diundur sampai 8 Februari 2021. Kebijakan ini memang terasa sangat berat bagi pemerintah dan terasa sangat memberatkan bagi masyarakat. Benar-benar sangat dilematis.

Belum genap 10 hari pemberlakuan PPKM saja, sudah banyak warga yang mengeluh dan merasa keberatan, terutama dari kalangan pengusaha. Terlebih bagi pengusaha kelas menengah ke bawah. Hal itu seperti sudah ditunjukkan oleh para pedagang di Yogyakarta, Sukoharjo dan beberapa daerah lainnya. Hal itu pun bisa dimaklumi, karena mereka selama ini mereka hanya mengandalkan hidup dari berjualan pada kisaran pukul 19.00 sampai 23.00. Dalam kondisi PPKM, mereka sudah harus menutup usahanya maksimal pukul 21.00.

Melihat perkembangan pandemi Covid-19 saat ini, PPKM memang menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mengendalikan pandemi Covid-19 yang sudah banyak makan korban. Memang sangat dilematis.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pembatasan tetap harus diberlakukan di tujuh provinsi di Jawa-Bali. Yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Dalam PPKM kali ini jam operasional pusat perbelanjaan atau mal dan restoran yang semula dibatasi hingga pukul 19.00 diundur sampai pukul 20.00. Namun, pengunduran waktu tersebut tetap saja dirasa masih memberatkan para pengusaha.

Disebutkan, berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi Komite PC-PEN yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Kamis (21/1) lalu, selama 10 hari PPKM (11-21 Januari 2021), laju peningkatan kasus Covid-19 di 77 kabupaten/kota belum dapat dikendalikan secara optimal. Karena itu, pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM selama dua minggu berikutnya, sampai 8 Februari 2021.

Tidak tertutup kemungkinan, pemberlakuan pembatasan kegiatan ini akan diberlakukan lebih luas, dengan penambahan kabupaten/kota lain. Sebab, sesuai peta zonasi risiko kenaikan kasus Covid-19 yang dipantau di 73 kabupaten/kota, masih ada 29 kabupaten/kota dengan zona risiko tinggi. 41 kabupaten/kota dengan zona risiko sedang, dan 3 kabupaten/kota dengan zona risiko rendah.

Mencermati data dan fakta-fakta tersebut, PPKM memang merupakan salah satu langkah yang harus diberlakukan oleh pemerintah. Namun untuk itu, pemerintah juga harus benar-benar nasib masyarakat yang secara langsung terdampak oleh PPKM ini. □

# Saatnya Audit Tata Ruang

## Sutaryono

**DALAM** sepekan berbagai musibah datang secara bersamaan. Tanah longsor, banjir, pesawat jatuh, gempa dan lainnya. Kesemuanya itu adalah kuasa Tuhan yang tidak bisa ditolak. Kita hanya bisa melakukan upaya-upaya pencegahan dan mitigasi untuk bencana-bencana yang bersifat struktural, utamanya terkait bencana banjir dan tanah longsor.

Bencana banjir dan tanah longsor sejatinya adalah bencana yang terstruktur, dimana penyebab dan cara penanganannya secara umum sudah diketahui khalayak luas. Hutan dieksploitasi, kawasan yang sejuk di daerah atas dibangun, semakin berkurangnya luasan *recharge area*, alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian marak. Juga bentaran sungai yang penuh dengan hunian, menumpuknya sampah di sepanjang sungai, merupakan penyebab utama banjir dan tanah longsor (Sutaryono, Opini KR 22/4/2016).

### Alih Fungsi

Dalam konteks ini, banjir dengan intensitas tertinggi dan cakupan wilayah terluas adalah banjir di Kalimantan Selatan. Di samping curah hujan yang tinggi, penyebab banjir diduga oleh alih fungsi lahan yang kurang terkendali. *Release Tim Tanggap Darurat LAPAN* mengkonfirmasi dugaan tersebut. Analisis yang dilakukan menggunakan citra satelit terhadap perubahan penutup lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito dalam kurun waktu 2010 - 2020 adalah sebagai berikut:

Pertama, telah terjadi penurunan luas hutan primer sebesar 13 ribu hektare, hutan sekunder sebesar 116 ribu hektare, luas sawah berkurang 146 ribu hektare dan semak belukar berkurang 47 ribu hektare. Kedua, terjadi peningkatan perluasan area perkebunan yang cukup signifikan, yakni 219 ribu hektare. Analisis Tim Tanggap Darurat LAPAN tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan guna lahan yang diduga sangat berpengaruh terhadap tingginya intensitas dan cakupan wilayah banjir.



KR-JOKO SANTOSO

tanah longsor selalu menghantui. Upaya-upaya mitigasi bencana, baik secara regulasi maupun secara praktis pasti sudah dilakukan utamanya melalui kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.

### Melanggar Kebijakan

Pada dasarnya, kita sudah mempunyai kebijakan dan instrumen untuk mengetahui apakah perubahan guna lahan itu melanggar kebijakan tata ruang atau tidak. Apabila sejak dini sudah diketahui adanya gejala alih fungsi lahan yang bisa menjadi penyebab bencana, maka segera dapat dilakukan penindakan dan penertiban. Kebijakan dan instrumen tersebut adalah Audit Tata Ruang yang diatur melalui Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Audit Tata Ruang.

Audit Tata Ruang adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap data dan informasi spasial serta dokumen pendukung untuk mengevaluasi suatu laporan atau temuan yang diduga sebagai indikasi pelanggaran di bidang penataan ruang. Hal di atas menunjukkan bahwa audit tata ruang menjadi salah satu upaya untuk mengungkap adanya indikasi pelanggaran. Audit tata ruang juga merupakan alat untuk menindaklanjuti adanya hasil-hasil pengawasan dan adanya pengaduan dari masyarakat terhadap indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang.

Sebagai bentuk pengawasan sekaligus sebagai upaya pencegahan sejak dini atas indikasi pelanggaran tata ruang dan/atau langkah awal upaya penertiban atas pelanggaran tata ruang maka audit tata ruang adalah suatu keharusan. Hasil audit yang dikemas dalam Laporan Hasil Audit (LHA) dapat ditindaklanjuti melalui penetapan kebijakan sesuai rekomendasi maupun ditindaklanjuti melalui penyidikan untuk indikasi pelanggaran pidana penataan ruang.

Audit tata ruang harus menjadi prioritas. Agar berbagai bencana banjir dan tanah longsor dapat diantisipasi. Bahkan tidak terjadi lagi di kemudian hari. □

\*) *Dr Sutaryono, Dosen pada STPN Yogyakarta dan Prodi Pembangunan Wilayah Fakultas. Geografi UGM*

## Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

## Pikiran Pembaca

**Pikiran Pembaca** terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email [pikiranpembaca@gmail.com](mailto:pikiranpembaca@gmail.com). Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

## Mensikapi WFH, WFO dan SFH

**SEJAK** diumumkannya pandemi Covid-19 pada awal Maret 2020 hingga saat ini, penerapan metode serta moda platform (program aplikasi) menjadi sarana pendukung utama pada kegiatan Work from Home (WFH), Work from Office (WFO) dan Study from Home (SFH) agar efektif dalam menjaga produktivitas kerja serta belajar siswa. Penerapan moda platform, budaya kerja dan belajar di rumah secara kontinyu menjadi asumsi normal bagi semua kalangan.

Institusi pendidikan menjadi lembaga paling banyak mendapat sorotan dan perhatian, terutama dalam menjalankan semua proses dan kegiatan pembelajaran agar penyediaan generasi tidak terhenti. Di tengah hiruk pikuknya dunia pendidikan menghadapi kebiasaan baru melalui WFH dan WFO bagi tenaga pendidik dan kependidikan serta SFH bagi siswa, tidak dapat dipungkiri terbuka peluang untuk tidak produktif, karena terbatasnya pengawasan secara intens dari pimpinan maupun atasan baik langsung maupun tak langsung.

Kendala yang dihadapi dunia pendidikan baik dari sisi perangkat, jaringan, maupun sumber daya manusia terlalu kompleks. Tuntutan berubahnya pola bekerja bagi guru membuat semua guru harus bekerja keras mencari gaya baru baik dalam mengatur ritme kerja maupun pemilihan model pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang tepat dan efektif sesuai kompetensi masing-masing.

Begitupun siswa, diharuskannya SFH bagi siswa, menuntut siswa untuk dapat mengelola waktu dan gaya belajar yang tepat agar dapat menyerap informasi dan ilmu yang disampaikan guru demi kesiapan menghadapi masa depan. Pengelolaan bimbingan belajar yang semula dilakukan secara tatap muka (synchronous) menjadi tidak tatap muka (asynchronous), menuntut pemilihan gaya belajar dan konsistensi siswa dalam penggunaan moda platform yang tepat serta disiplin diri. Tidak bertamala lama terbawa arus kemalasan dan kepu-

tusasaan.

Beban dan tanggungjawab profesi guru sebagai pendidik tidak serta merta berpindah kepada orang tua, kakak, atau saudara yang lebih tua, mengingat latar belakang pendidikan serta pengalaman sangat heterogen. Guru harus meng-update diri untuk mengintegrasikan kemampuan pedagogik dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Diperlukan proses transisi dan peningkatan kompetensi melalui pelatihan atau workshop baik terstruktur maupun mandiri agar penerapan model pembelajaran berbasis TIK dapat dilakukan dengan tepat. Guru perlu keluar dari zona nyaman dan belajar menaklukkan sistem pembelajaran daring yang bagi sebagian guru merupakan sesuatu yang baru. Utak-atik berbagai menu dari platform digital yang belum pernah digunakan sebelumnya harus dilakukan agar dapat memberikan pengajaran yang terbaik bagi siswa.

Orang tua perlu menciptakan suasana kondusif di rumah agar anak dapat belajar dengan serius namun tetap *enjoy*. Sistem belajar secara daring atau online menuntut komitmen dan kedisiplinan tinggi dari siswa. Dengan didukung pengajaran menarik dari guru serta suasana belajar yang menyenangkan di rumah, diharapkan siswa dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan nyaman sampai dimungkinkan kembali belajar di sekolah.

Begitupun sebagai kendala bagi terlaksananya proses belajar mengajar di rumah, seperti ketersediaan fasilitas sekolah terkait platform digital maupun keterbatasan fasilitas perangkat dan jaringan bagi siswa berakibat siswa tidak dapat mengakses kegiatan belajar online. Sinergi positif antara pihak pimpinan institusi pendidikan, guru, siswa dan keluarga adalah modal utama untuk membentuk sebuah tim solid dan produktif sesuai bidang masing-masing. □

\*) *Nurlaila Mahmudah, Guru Matematika SMKN 3 Yogyakarta.*

# Mengawal Itikad Baik Perpres Ekstremisme

## Agung SS Widodo

**PRESIDEN** Joko Widodo, 6 Januari lalu menandatangani Peraturan Presiden No 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada Terorisme (RAN PE) tahun 2020-2024. Dalam Pasal 1 Perpres tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan RAN PE adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme yang berbasis pada kekerasan dan mengarah pada aksi terorisme.

*Goal setting* dari Perpres ini yakni negara secara serius ingin memberikan perlindungan (hak atas rasa aman) kepada warga negara dari gangguan ekstremisme yang menggunakan cara-cara kekerasan dan disinyalir mengarah pada aksi terorisme. Salah satu konsekuensi birokratif dari kehadiran Perpres ini adalah akan dibentuk Sekretariat Bersama RAN PE yang diisi oleh lembaga tinggi negara seperti Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Juga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

### Pengawasan

Kehadiran perpres ini tentunya bukan sesuatu yang mengagetkan, mengingat berbagai kasus kekerasan bahkan sampai pada pembantaian yang dilakukan sekelompok ekstremis masih terjadi. Kasus terakhir yang masih segar dalam ingatan publik yakni pembunuhan satu keluarga yang terjadi di Sigi, Sulawesi Tengah, November 2020. Sepanjang tahun 2020, Kepolisian RI setidaknya telah menangkap 228 tersangka terorisme. Dalam proses pelaksanaan peraturan,

publik harus terus melakukan pengawalan agar itikad baik dari negara melalui perpres ini dapat terealisasi sesuai norma hukum yang berlaku. Proses pengawasan yang dilakukan oleh publik dalam konteks ini setidaknya ada tiga hal. Pertama, ikut memastikan bahwa keberadaan Sekretariat Bersama RAN PE mampu menyusun agenda pencegahan dan penanggulangan ekstremisme secara komprehensif dan terukur.

Komprehensif dalam pengertian adanya pemetaan dari hulu hingga hilir meliputi sisi ideologis, historis, maupun sosiologis. Sehingga nantinya pilihan-pilihan aksi yang dilakukan tidak hanya secara represif namun juga menekankan aspek preventif. Kedua, negara harus memastikan bahwa tidak boleh ada pelanggaran kemanusiaan, sebagaimana pernah terjadi pada kasus penangkapan Siyono di Klaten, Jawa Tengah, yang berakibat pada meninggalnya terduga. Dimana setelah dilakukan penyelidikan ternyata yang bersangkutan bukanlah teroris.

Untuk mencegah hal tersebut tidak kembali terjadi, negara perlu menyusun mekanisme proses penangkapan terduga ekstremisme atau terorisme secara lebih ketat. Adanya asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan. Negara harus hadir terlebih dahulu dalam wajah sebagai payogom rakyat bukan sebagai algojo.

### Stigmatisasi

Ketiga, menghindari stigmatisasi atas perilaku yang di-

jamin kebebasannya oleh hukum. Dalam konteks ini baik negara maupun warga negara tidak boleh memelihara syakwasangka yang berujung pada penghakiman dan stigmatisasi. Disadari atau tidak, inilah yang terjadi saat ini. Contoh paling sederhana, tuduhan ekstrim atau radikal bagi mereka yang berpenampilan kearab-araban. Kemudian, berbeda pandangan soal tafsir Pancasila dianggap tidak Pancasila dan masih banyak tuduhan yang memicu konflik horisontal.

Perpres ini merupakan itikad baik negara untuk melindungi warga negara dari ancaman ekstremisme yang bisa jadi mengatasnamakan SARA. Maka negara perlu membuktikan bahwa itikad baik tersebut benar-benar ditanggapi semua rakyat dengan perasaan adil dan tidak berpihak pada kelompok tertentu. □

\*) *Agung SS Widodo MA, Peneliti Sosial Politik PSP UGM dan Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Sleman*

## Pojok KR

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang.  
- Tambah panjang.

\*\*\*  
Asap kawah Gunung Merapi terpantau mencapai ketinggian 400 meter.  
- Tambah ancaman.

\*\*\*  
Beberapa kabupaten/kota mulai umumkan hasil Pilkada serentak 2020.  
- Tunggu pelantikan.

*Beraba*

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019). **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurinya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percepatan:** Jalan Raya Yogyakarta - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan

**Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id> dan [www.krjogja.com](http://www.krjogja.com). **Alamat e-mail:** [naskahkr@gmail.com](mailto:naskahkr@gmail.com). **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:** **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

**Wartawan:** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Samarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto.

**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha.

**Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

**Pemimpin Umum:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussenahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afifiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono., **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Pemimpin Perusahan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langgan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: [iklan@kr.co.id](mailto:iklan@kr.co.id), [iklankrkyk@yahoo.com](mailto:iklankrkyk@yahoo.com), [iklankrkyk13@gmail.com](mailto:iklankrkyk13@gmail.com).

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu' Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga... Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%